

Sejarah Berdirinya Kesultanan Serdang 1723-1946

Ricu Sidiq, N Najuah, Ika Purnama Sari, Friska Olivia,
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan
Email: najuah@unimed.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to provide an understanding to the public that previously in the Serdang Bedagai region there was once a Sultanate that was known to the Malay peninsula, namely the Serdang Sultanate and to add written sources to show the existence of the Serdang Sultanate. The method used in this research is historical method through heuristic, criticism, interpretation, and historiography steps. The results of this study are that the establishment of the Serdang Sultanate originated from a dispute that occurred as a result of a struggle for the throne between the second and third sons of the Deli Sultanate which occurred around 1723, namely between Tuanku Pasutan and Tuanku Umar Johan Alamshah. Since its inception, the Serdang Sultanate continued to experience its glory and peak during the reign of Sultan Thaf Sinar Basarshah (1817-1850) which was marked by progress and bustling trade so that the Serdang region became prosperous. Then, the decline of the Sultanate of Serdang occurred during the reign of Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah.*

Keywords: *Serdang Kingdom, Success, Collapse*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa dulunya di wilayah Serdang Bedagai pernah berdiri sebuah kesultanan yang dikenal hingga ke Semenanjung tanah Melayu yaitu Kesultanan Serdang dan untuk menambah sumber tulisan guna menunjukkan eksistensi Kesultanan Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah melalui langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdirinya Kesultanan Serdang berawal dari perselisihan yang terjadi akibat perebutan tahta antara putra kedua dan ketiga kesultanan deli yang terjadi sekitar tahun 1723 M, yakni antara Tuanku Pasutan dengan Tuanku Umar Johan Alamshah. Sejak awal berdirinya Kesultanan Serdang terus mengalami kejayaan dan puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Basrshah (1817-1850) yang ditandai dengan maju dan ramainya perdagangan sehingga wilayah Serdang menjadi makmur. Kemudian, kemunduran Kesultanan Serdang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Basyaruddin Shariful Alam Syah. Pada saat pemerintahannya banyak terjadi konflik antara pejabat-pejabat daerah taklukkan dan akibat adanya hegemoni Belanda pada tahun 1862.

Kata Kunci: *Kerajaan Serdang, Kejayaan, Keruntuhan*

PENDAHULUAN

Kesultanan Serdang adalah salah satu kerajaan Islam di Sumatera Utara dan menjadi salah satu kesultanan yang berada di bawah kekuasaan

Keultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar muda (Mailin, 2021). Kesultanan Serdang dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Deli, pembagian ini disebabkan oleh perselisihan antar saudara untuk perebutan tahta pada saat itu. Perselisihan muncul setelah wafatnya Tuanku Panglima Paderap yang memerintah hingga tahun 1720. Saat itu terjadi perpecahan di Kesultanan Deli akibat pengaruh Kerajaan Siak di Sumatera Timur dan perebutan kekuasaan di istana Kesultanan Deli antara Tuanku Panglima Pasutan Kejeruan Santun, dan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan yang merupakan anak dari Tuanku Panglima Paderap. Puncaknya terjadi pada tahun 1723 ketika Tuanku Umar Johan Alamshah kalah dalam pertempuran melawan saudaranya yaitu Tuanku Panglima Pasutan. Akibatnya, Tuanku Umar Johan Alamshah dan ibunya kemudian harus mengungsi ke Kampung Besar (Serdang). Akibat kemenangan tersebut, takhta Kesultanan Deli jatuh ke tangan Tuanku Panglima Pasutan.

Melihat kekacauan tersebut, beberapa petinggi wilayah yakni Datuk Sunggal Serbanyaman, Raja Ulung Sinembah, Raja Ulung Tanjong Morawa Dan Kejeruan Lumu sebagai wakil Aceh menobatkan Tuanku Umar Johan Pahlawan Alamshah Kejeruan Junjungan Sebagai Sultan Serdang Pertama pada tahun 1728. Wilayah kesultanan berpusat d kampung Besar (serdang) tempat dimana ibunya Tuanku Ampunan Sampali tinggal (Dinas Komunikasi danm Informatika Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2018).

Pada masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama yaitu Tuanku Umar Johan Alamshah (1723-1767), kondisi kesultanan serdang belum

sepenuhnya aman karena banyaknya konflik yang dihadapi, kemudian pada masa sultan yang kedua yaitu Sultan Ainan Johan Alamshah (1767-1817), kesultanan serdang mulai menata konsep untuk mengatur pemerintahannya. Salah satu yang terpenting adalah dengan dibentuknya Lembaga Orang Besar Berempat di serdang (Wazir Sultan) yaitu: Pangeran Muda berwilayah di Sungai Tuan, Datok Maha Menteri berwilayah di Araskabu, Datok Paduka Raja berwilayah di Batangkuis dan Sri Maharaja di Ramunia.

Dilihat dari perjalanan sejarahnya, luas wilayah Kesultanan Serdang mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang diperoleh melalui beberapa cara, Antara lain penaklukan, kekerabatan (perkawinan), atau penggabungan kerajaan-kerajaan kecil terhadap wilayah Serdang. Sejak berdirinya, Kesultanan Serdang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial-politik yang terjadi. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, Kesultanan Serdang dimasukkan ke dalam Residensi Sumatra Timur bersama beberapa kerajaan lainnya, antara lain: Kerajaan Asahan, Kerajaan Deli, Kerajaan Kualuh dan Leidong, Kerajaan Langkat, Kerajaan Pelalawan, serta Kerajaan Siak Sri Inderapura.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dan dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan tahun 1949 terjadi perubahan lagi. Kesultanan Serdang yang semula merupakan bagian dari wilayah Sumatra Timur, sejak tahun 1950 diubah menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Utara hingga saat ini. Berdasarkan data yang ditemukan dari beberapa sumber, wilayah yang pernah dan masih menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Serdang, antara lain: Percut, Perbaungan, Sungai Ular, Sungai Serdang, Padang, Bedagai,

Sinembah, Batak Timur, Negeri Dolok, Batubara (Lima Laras), Serbajadi, Denai, Patumbak, Rantau Panjang, Bandar Labuhan, Lengo Seperang/Kwala Namu, Pantai Cermin, Pertumbukan/Galang, Medan Senembah, Tambak Cikur, Rantau Panjang, hingga Lubuk Pakam, dan lain sebagainya (Nusantara, 2022). Karena masih minimnya tulisan ilmiah mengenai sejarah kesultanan serdang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sejarah Kesultanan Serdang dengan tujuan agar masyarakat umum tau bahwa dulunya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pernah berdiri sebuah kerajaan yang dikenal hingga ke Semenanjung Tanah Melayu dan menambah sumber tulisan terkait sejarah Kesultanan Serdang untuk menunjukkan eksistensi Kesultanan Serdang di masa lalu.

METODE

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang menjadi fokus penelitian. Metode dalam upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Surahman, 2016). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Garraghan berpendapat bahwa Metode penelitian sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil "*sinthese*" (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Hartatik, 2018). Sesuai dengan prosedur dalam metode sejarah yang digunakan, maka

langkah-langkah dalam penelitian ini, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Kesultanan Serdang

Sejarah berdirinya Kesultanan Serdang berawal dari perselisihan di dalam Kesultanan Deli. Pada tahun 1723 ketika masa pemerintahan Tuanku Panglima Paderap (Raja Ketiga Kesultanan Deli) terjadi perselisihan antara putra kedua dan ketiganya. Perselisihan ini muncul karena putra sulung raja yang kelak menggantikannya memiliki cacat dimatanya, sehingga tidak dapat menjadi raja. Maka hanya salah satu diantara putra kedua dan ketiga yaitu Tuanku Pasutan dan Tuanku Umar yang dapat menjadi raja Kesultanan Deli selanjutnya. Putra Kedua Tuanku Pasutan sangat berambisi untuk menjadi raja dan mengambil alih tahta Kesultanan Deli sehingga dirinya mengusir adiknya yaitu Tuanku Umar bersama ibunya ke wilayah serdang. Inilah yang menjadi awal berdirinya Kesultanan Serdang.

Jika dilihat dari latar belakang kehidupannya, yang layak menjadi penerus raja adalah Tuanku Umar posisinya sebagai pewaris takhta yang sah karena dia adalah putra dari permaisuri. Sedangkan Tuanku Pasutan hanyalah putra dari seorang selir raja. Namun, mengingat Tuanku Umar usianya masih di bawah umur, membuat ia dengan mudah disingkirkan dari Kesultanan Deli.

Ketika Tuanku Pasutan berhasil merebut tahta Kesultanan Deli, tidak semua kaum bangsawan dan raja-raja lokal mengakui Tuanku Panglima Pasutan sebagai seorang Sultan Deli. Beberapa diantaranya menentang

kepemimpinan Sultan Pasutan, dan mendukung Tuanku Umar Johan Alamshah sebagai sultan yang sah. Tercatat dalam sejarah lokal raja-raja yang memberikan dukungan terhadap Tuanku Umar Johan Alamshah adalah Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Aceh Kejeruan Lumu/Aceh (Ichwan, Azhari, 2013).

Untuk menghindari perang saudara yang berkepanjangan, maka dua Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah, bersama dengan Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu), mengangkat Tuanku Umar sebagai Raja Serdang pertama pada tahun 1723. Sejak saat itu, Kerajaan Serdang berdiri sebagai pecahan dari Kerajaan Deli. Wilayah Kesultanan Serdang meliputi daerah Batang Kuis, Padang Bedagai, Percut, Senembah, Araskabu, dan Ramunia. Kemudian melalui perkawinan, daerah Perbaungan menjadi bagian dari Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang berdiri selama lebih dari dua abad, yakni sejak 1723 hingga 1946 (Nu'man, 2017).



Gambar 1. Istana Kesultanan Serdang (Basarshah, 2009)

Berikut adalah nama-nama raja yang memerintah Kesultanan Serdang:

1. Sultan Umar Johan Alam Shah
2. Sultan Ainan Johan Alam Shah
3. Sultan Thaf Sinar Bashar Shah
4. Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah
5. Sultan Sulaiman Shariful Alam Shah

Ketika Sultan Umar Johan Alamshah gugur dalam pertempuran melawan pasukan Kerajaan Siak yang berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan Melayu di pesisir Sumatera Timur, ia kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Ainan Johan Alamshah. Dibawah kepemimpinan Sultan Ainan Johan Alamshah, wilayah Kesultanan Serdang diperluas hingga ke Percut dan Serdang Hulu (M. Sahbainy, 2018). Selain itu, peraturan adat-istiadat kerajaan juga diperketat yang dalam filosofis adat Melayu berdasarkan pada Hukum Syara' yang didasarkan pada Kitabullah (Samin, 2015). Apabila adat tersebut dilanggar maka pemerintahan dan masyarakat memberikan sanksi yang bersifat sosial yaitu dikucilkan dari masyarakat dan pidana berupa dihukum oleh kerapatan adat, seperti: diusir dari negeri Serdang dan dihukum mati (Sumanti, 2019). Setelah Tuanku Ainan mangkat pada tahun 1817, kemudian digantikan oleh putra keduanya yaitu Sultan Thaf Sinar Bashar Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Bashar Shah, Kesultanan Serdang mengalami kemakmuran dan ketentraman karena perdagangan yang ramai (Lestariyati, Yunnarsi, & Limbeng, 2018).

Setelah Sultan Thaf Sinar Bashar Shar mangkat, kursi pemerintahan beralih pada Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi konflik internal dan eksternal. Selain

konflik dengan Kesultanan Deli atas perluasan wilayah, Serdang juga menghadapi hegemoni Belanda yang datang pada tahun 1862. Melalui Acte van Erkenning tertanggal 16 Agustus 1862. Kesultanan Serdang akhirnya terpaksa tunduk pada Belanda. Ketika Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah wafat, beliau digantikan oleh Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah.



Gambar 2. Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah (Basarshah, 2009)

Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah ibukota Kesultanan Serdang dipindahkan. Pada awalnya Istana Darul Arif berada di wilayah Rantau Panjang, namun pada tahun 1884 Istana Darul Arif berada di Kota Galuh, Perbaungan seiring dengan dipindahkannya ibukota Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang yang berada di Kota Galuh didirikan oleh Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah pada tanggal 29 Juli 1889. Pemindahan ibukota Kesultanan Serdang merupakan bentuk perlawanan dalam menangkal semakin kuatnya pengaruh penjajahan Belanda.

Pemindahan ibukota Kesultanan Serdang terjadi karena pada saat itu Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah menolak memindahkan ibukotanya ke Lubuk Pakam sesuai dengan permintaan pemerintah kolonial Belanda.

Sebagai bentuk penolakan, Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah membangun istana baru dan mendirikan Masjid Raya Sulaimaniyah. Di saat yang bersamaan, Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah juga membangun pasar dan kompleks pertokoan yang diberi nama Simpang Tiga Perbaungan.

Di bidang pendidikan, Sultan Sulaiman mendirikan sekolah Syairrussulaiman di Perbaungan. Selain itu, Sultan Sulaiman juga dikenal akrab dengan kesenian dan kebudayaan. Sekitar tahun 1898, Sultan Sulaiman mengunjungi Kesultanan Kedah (Malaysia) untuk meningkatkan hubungan kerjasama terutama dibidang pertanian. Keberhasilannya dalam bidang pertanian membuat Sultan Kedah mengharapkan kedatangannya untuk mengajarkan teknik pengelolaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan swasembada pangan. Karena hal tersebut, Sultan Kedah memberikan hadiah berupa seni pertunjukan, yaitu Teater Makyong (Nurmaizar, 2012). Sekali dalam setahun kesultanan selalu menyelenggarakan teater ke berbagai pelosok Serdang yang membawakan cerita-cerita Melayu, India, dan Barat untuk menghibur rakyat secara gratis.

Masa Kejayaan Kesultanan Serdang

Kesultanan Serdang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Bashar Shah (1817-1850). Saat itu, penerapan adat Melayu yang berbasis Islam sangat dijunjung tinggi. Akibatnya banyak masyarakat Batak Hulu yang memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, kawasan Serdang menjadi kawasan yang aman, tenteram dan makmur karena perdagangan di kawasan tersebut sangat maju dan ramai, terutama dalam perdagangan lada dan hasil hutan antara Serdang

dengan pulau Pinang. Wilayah Kesultanan Serdang juga diperluas meliputi meliputi Percut, Padang dan Bedagai, Senembah, Batak Timur Dusun hingga ke Negeri Dolok (Muhammad Syukri Ramadhan, 2018).

Bahkan, ketika Sultan Thaf Sinar Baharshah berkuasa, ia memerintah dengan lemah lembut, sangat toleran dan selalu bermusyawarah dengan negeri-negeri yang berada di bawah naungan Kesultanan Serdang, suka memajukan ilmu pengetahuan, dan memiliki kapal dagang pribadi. Dalam catatan John Anderson ketika dia mengunjungi Serdang pada tahun 1823 (Herviyunita, Irwansyah, & Devianty, 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Perdagangan antara Serdang dan Pinang sangat ramai (terutama lada dan hasil hutan)
2. Sultan Thaf Sinar Basarshah sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan
3. Industri rakyat maju dan banyak pedagang dari pantai barat Sumatra melintasi pegunungan bukit barisan menjual barang dagangannya ke luar negeri melalui Serdang.
4. Sultan Thaf Sinar Basarshah sangat toleran dan suka bermusyawarah.
5. Cukai di Serdang cukup moderat.

Itulah sebabnya industri rakyat berkembang dengan pesat dan banyak pedagang dari pesisir barat Sumatra menjual hasil produksinya ke luar negeri melalui daerah Serdang. Dia juga membuat perjanjian perdagangan dengan Inggris pada tahun 1823. Nilai ekspor saat itu adalah 8.000 pikul, terdiri dari lada, tembakau, kacang putih, emas dan kapur barus. Pada saat yang sama, Inggris memasok kain-kain yang diproduksi di Eropa. Nama

Kesultanan Serdang begitu besar dan dikenal di negara lain hingga ke Semenanjung Melayu. Banyak kerajaan lain, seperti Padang, Bedagai, dan Senembah, yang meminta dukungan militer dari Kesultanan Serdang.

Masa Keruntuhan Kesultanan Serdang

Kemunduran Kesultanan Serdang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah yang ditandai dengan kedatangan Belanda. Akibatnya, Sultan Serdang meminta bantuan kepada Kesultanan Aceh Darussalam untuk melawan penjajah. Sebagai imbalannya, pada 1854 Sultan Aceh Darussalam menganugerahkan gelar “Wazir Sultan Aceh” kepada Sultan Basyaruddin Shariful Alam Shah yang menyandang gelar Mahor Cap Sembilan.

Pada masa pemerintahannya banyak terjadi konflik antar pejabat daerah taklukan Kesultanan Serdang, sehingga pejabat tinggi dan wazir serta raja-raja dari wilayah taklukan Serdang sering mengalami pergantian. Di sisi lain, konflik perluasan wilayah antara Kesultanan Serdang dan Kesultanan Deli semakin memanas. Pada saat yang sama, Kesultanan Serdang juga harus menghadapi gangguan dari penjajah Belanda. Namun, karena hegemoni Belanda yang sangat kuat dan terbitnya Acte Van Erkenning pada tanggal 16 Agustus 1862, Kesultanan Serdang harus tunduk kepada Belanda. Kesewenang-wenangan Belanda semakin merajalela ketika Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah pergi ke Jepang. Belanda memanfaatkan kondisi ini dengan memperkecil wilayah Kesultanan Serdang. “Kesewenang-wenangan Belanda menyebabkan perubahan dalam susunan orang-orang besar dimana

Belanda menghapuskan beberapa posisi pemerintahan, termasuk raja muda dan wazir paduka setia maharaja”(Khairuddin, 2016).

Selain karena pendudukan Belanda, kemunduran Kesultanan Serdang juga disebabkan oleh meningkatnya konflik antara Serdang dan Deli. Pada tanggal 3 Maret 1946, sebuah “Revolusi Sosial” terjadi di Sumatra Timur. Para loyalis Republik yang pro komunis menuduh raja dan para bangsawan sebagai pengkhianat karena dianggap sebagai abdi pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Selama revolusi sosial terjadi, raja-raja ditangkap dan beberapa diantara mereka dibunuh.

Namun kondisi tersebut sedikit berbeda di wilayah Kesultanan Serdang. Karena dukungan positif Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah terhadap kaum pergerakan dan perasaan anti Belanda, maka tidak terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap keluarga kesultanan. Pada tanggal 4 Maret 1946, Kesultanan Serdang menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu berakhirilah masa pemerintahan Kesultanan Serdang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa daerah pada Kesultanan Serdang pada awalnya merupakan wilayah dari Kesultanan Deli. Terbaginya wilayah kekuasaan ini dikarenakan adanya pertikaian antarsaudara yang menyebabkan terbaginya wilayah kekuasaan. Perbaungan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Serdang setelah pemindahan dari Rantau Panjang dan mencapai masa keemasan di zaman Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817-1850). Pada masa ini penerapan Adat Melayu yang

bersendikan Islam sangat dijunjung tinggi, hasilnya banyak rakyat Batak Hulu yang memeluk Islam. Di masa pemerintahannya, Serdang menjadi aman tenteram dan makmur karena perdagangan yang maju. Nama kesultanan Serdang begitu besar dan dikenal negeri-negeri lain sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Banyak kerajaan lain seperti Padang, Bedagai, dan Senembah yang meminta bantuan militer dari Kesultanan Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basarshah, T. . S. (2009). *Sumatera Utara Tempo Doeloe*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- [2] Dinas Komunikasi danm Informatika Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. (2018). Profil Kabupaten Serdang Bedagai. Retrieved October 24, 2022, from <https://serdangbedagaikab.go.id/assets/content/tetap/profilkabupaten.pdf>
- [3] Hartatik, W. & E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- [4] Herviyunita, F., Irwansyah, I., & Devianty, R. (2021). Kesultanan Serdang dan Jejak Peninggalannya. *Local History & Heritage*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.97>
- [5] Ichwan, Azhari, dkk. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Shariful Alamsyah*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazahah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI.
- [6] Khairuddin. (2016). Peran Kesultanan Serdang Dalam Pengembangan

Islam Di Serdang Bedagai.

- [7] M. Sahbainy, N. (2018). Sekeping Kisah Kesultanan Serdang. Retrieved from <https://kovermagz.com/sekeping-kisah-kesultanan-serdang/>
- [8] Mailin, M. (2021). Peran Sultan Iskandar Muda dalam Pengembangan Islam dan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(1), 25. <https://doi.org/10.37064/jki.v8i1.9478>
- [9] Muhammad Syukri Ramadhan. (2018). *Politik Islam Melayu "Studi Kebijakan Politik Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah di Serdang Tahun 1881-1946 Masehi."*
- [10] Nu'man, B. (2017). *Jelajah Sumatra Utara: Kemegahan Arsitektur Peninggalan Bersejarah*. Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara.
- [11] Nurmaizar, N. (2012). Tari Dalam Teater Tradisional Makyong Di Sumatera Utara. *Jurnal Seni Tari*, 1(2), 1–16. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gesture/article/view/875>
- [12] Nusantara, K. (2022). Sejarah Kesultanan Serdang. Retrieved from <https://www.kerajaannusantara.com/id/kesultanan-serdang/sejarah>
- [13] Sri Lestariyati, F, Ratna Yunnarsi, Limbeng, J. (2018). Digitalisasi Data Keraton, 3.
- [14] Sumanti, S. T. & T. B. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang)*. Yogyakarta: Atap Buku.
- [15] Surahman, dkk. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.